

STRATEGI KEKUATAN EKONOMI GLOBAL DI AFRIKA: Pelajaran untuk Indonesia*

Aleksius Jemadu

Guru Besar Politik Internasional FISIP UNPAR, Bandung

Pendahuluan

Akhir-akhir ini benua Afrika semakin menjadi sorotan dunia internasional. Baik negara-negara industri maju maupun negara-negara yang mendapat julukan sebagai *the emerging markets* seperti Cina dan India berlomba-lomba meningkatkan hubungan ekonomi dan politik dengan benua tersebut. Hubungan internasional yang dilakukan oleh aktor negara selalu didasarkan pada kebutuhan atau kepentingan nasional yang bisa diperoleh dari lingkungan eksternalnya. Tulisan ini khusus membahas strategi kekuatan-kekuatan ekonomi global seperti AS, Uni Eropa dan Jepang dalam meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Afrika.

Selain mengidentifikasi tujuan jangka pendek dan panjang dari kekuatan-kekuatan global tersebut akan dibahas juga instrumen kebijakan luar negeri yang mereka gunakan demi pencapaian tujuan mereka. Berbagai perspektif atau pendekatan teoritis dalam Ilmu Hubungan Internasional yang biasa digunakan oleh para analis selama ini memberikan *insights* yang bermanfaat untuk memahami dimensi-dimensi penting dari keterlibatan kekuatan-kekuatan ekonomi global di Afrika. Perspektif neorealisme menjelaskan perilaku *major powers* yang sensitif terhadap potensi perubahan distribusi kekuatan yang terjadi dalam sistem internasional. Dengan menggunakan pendekatan ini Afrika dilihat sebagai wilayah pengaruh (*sphere of influence*) yang mengandung makna strategis baik dari segi ekonomi maupun keamanan bagi negara-negara besar.

Secara lebih spesifik perilaku AS, Uni Eropa dan Jepang dilihat sebagai reaksi spontan terhadap agresivitas Cina dan India yang sedang memperluas hubungannya dengan benua Afrika. Pada saat yang sama ketiga kekuatan ekonomi global tersebut juga bersaing di antara mereka sendiri

* Makalah ini disampaikan dalam Pertemuan Kelompok Ahli, BPPK-Departemen Luar Negeri, Solo, 11-12 Juni 2008

20-10-25472

untuk memantapkan posisinya dalam apa yang dikenal dengan fenomena *triadization* di mana perekonomian global semakin ditentukan oleh tiga pusat kekuatan ekonomi dunia yaitu Eropa Barat melalui Uni Eropa, AS dan Asia Timur (Jepang dan Cina). Dalam kaitan ini penguasaan atau kontrol atas akses energi ke Afrika merupakan prioritas penting bagi kekuatan-kekuatan global mengingat pentingnya komoditas tersebut baik untuk industri maupun strategi keamanan global. Dari sudut pandang neoliberalis hubungan AS, Uni Eropa dan Jepang di satu pihak dengan Afrika dilihat sebagai konsekuensi logis dari globalisasi ekonomi yang mendorong aktor-aktor internasional untuk memperkuat kedudukannya dalam jejaring ekonomi global melalui diversifikasi tujuan ekspor dan investasi. Hubungan itu tidak dilihat sebagai *zero sum game* tetapi *positive sum game* di mana setiap aktor internasional menjadi *beneficiary* dari globalisasi ekonomi. Menarik juga untuk disimak bagaimana AS, Uni Eropa dan Jepang berusaha melembagakan interdependensi tersebut demi menjamin pencapaian tujuan jangka panjang. Demikianpun sebaliknya, bagaimana negara-negara Afrika memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh mitra dagangnya dari negara-negara maju. Dari kacamata strukturalis atau neomarxist hubungan AS, Uni Eropa dan Jepang dengan Afrika dilihat sebagai kelanjutan dari kolonialisme dan imperialisme masa lalu yang justru memarjinalkan Afrika. Sikap AS, Uni Eropa dan Jepang yang cenderung menjalankan politik dominasi dan hegemoni pasti mengundang resistensi dari negara-negara Afrika demi martabat bangsanya. Dalam hal ini Cina dan India memanfaatkan kelemahan negara-negara industri maju memosisikan dirinya sebagai mitra sejati negara-negara Afrika dalam hubungan kemitraan yang saling menguntungkan.

Daya Tarik Afrika

Afrika yang tadinya dinomorduakan dalam berbagai fora internasional kini memiliki daya tarik yang kuat karena berbagai alasan. Pertama, *stereotype* Afrika sebagai benua yang miskin dan tertinggal kini tidak berlaku lagi karena pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Berbagai laporan dari lembaga keuangan dan media internasional menunjukkan bahwa prospek ekonomi benua Afrika pada abad 21 ini semakin cerah dan periode ekonomi yang stagnan telah berlalu. Laporan dari IMF dengan judul *World Economic Outlook 2007* yang dikutip oleh majalah *The Economist* edisi 19 Oktober 2007 memperkirakan bahwa ekonomi Afrika tumbuh dari 6.1 % tahun 2007 menjadi 6.8 % tahun 2008. Satu dekade sampai tahun 1996 ekonomi Afrika hanya

tumbuh 2.2 % per tahun tetapi sejak saat itu sampai tahun 2006 pertumbuhannya menjadi rata-rata 5 % per tahun.¹ Data ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan output ekonomi yang cukup besar yang berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat. Pada level individual negara-negara juga ada kemajuan yang sangat signifikan terutama di negara-negara penghasil minyak seperti Angola dan Nigeria. Afrika Selatan yang merupakan negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di Afrika sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi penyelenggara Piala Dunia Sepakbola tahun 2010. Nigeria mengalami keuntungan dari kenaikan harga minyak dunia. Para pemimpin Afrika semakin percaya diri bahwa dengan tingkat pertumbuhan ekonomi regional dan nasional yang tinggi mereka dapat mempersempit jurang perbedaannya dengan benua-benua lain.

Kedua, di tengah kehausan dunia akan energi dan bahan mentah lainnya untuk kebutuhan industri Afrika menawarkan diri sebagai pemasok dengan deposit yang bisa mengamankan kebutuhan jangka panjang. Dengan demikian Afrika menjadi arena persaingan baru di antara negara-negara besar yang ingin mengamankan proses industrialisasinya dengan pemasokan energi dan bahan mentah yang terjamin. Kekayaan alam Afrika tergambar dalam data berikut ini. Afrika memiliki 8 % dari cadangan minyak dunia. Dibandingkan dengan kawasan Timur Tengah yang sangat rentan terhadap instabilitas akibat pertikaian Arab - Israel dan juga kasus senjata nuklir Iran saat ini, sebagai pemasok energi dunia Afrika relatif lebih aman dan bebas dari guncangan politik yang dapat menghentikan pemasokan minyak ke negara-negara industri. Karena itu bisa dipahami bahwa saat ini AS mengimpor lebih banyak minyak dari Afrika daripada Teluk Persia. Afrika juga menghasilkan berbagai bahan mineral lainnya. Misalnya, Afrika Selatan memiliki 88 % dari total cadangan platinum dunia. Tidaklah mengherankan kalau *The Economist* menjuluki Afrika sebagai benua masa depan. Dikatakannya: *Africa is the continent of the future and always will be.*²

Ketiga, ditinjau dari sudut pandang negara-negara maju, menjalin hubungan perdagangan dan investasi dengan benua Afrika membawa keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang lain. Alasannya, peningkatan pembangunan ekonomi negara-negara Afrika telah menciptakan *demand* yang tinggi terhadap *capital goods* yang bisa diimpor dari negara-negara maju. AS, Uni Eropa dan Jepang telah memperkirakan

¹ *The Economist*, October 19, 2007.

² *The Economist*, May 17, 2005.

bahwa keunggulan teknologi mereka dalam eksplorasi sumberdaya alam, pertanian, dan industri manufaktur yang dilengkapi dengan pengalaman manajemen bisnis yang profesional merupakan modal utama untuk melakukan ekspansi hubungan perdagangan dan investasi ke Afrika. Selain itu daya beli masyarakat yang semakin tinggi merupakan potensi pasar bagi ekspor negara-negara maju. Benua Afrika yang sangat luas tentu memerlukan alat transportasi darat, laut dan udara dalam skala kuantitas yang besar. Dalam hal ini AS dan Uni Eropa (Boeing dan Airbus) bersaing sebagai pemasok utama pesawat udara berbadan lebar yang dibeli oleh maskapai penerbangan negara-negara Afrika yang ingin mengambil keuntungan dari interaksi ekonomi yang semakin meningkat di antara negara-negara Afrika sendiri. Sejalan dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi negara-negara Afrika kebutuhan kelas menengah di perkotaan akan kebutuhan alat kendaraan bermotor serta *consumer goods* lainnya telah mengundang investasi dalam bidang otomotif dari AS, Uni Eropa dan Jepang.

Strategi AS, Uni Eropa, dan Jepang di Afrika

Kekuatan-kekuatan besar seperti AS, Uni Eropa dan Jepang senantiasa berusaha untuk memperluas wilayah pengaruhnya secara ekonomi dengan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh pasar global maupun regional. Mereka menjalankan strategi yang terpadu melalui pemanfaatan dan mobilisasi sumberdaya ekonomi dan militer yang dimilikinya untuk mencapai tujuan kebijakan luar negerinya. Setelah selesainya Perang Dingin pada akhir tahun 1980an, kekuatan-kekuatan besar dunia memusatkan perhatiannya pada persaingan ekonomi dengan memperluas pasar bagi barang industri dan mengamankan suplai bahan mentah untuk kepentingan industrinya. Belakangan ini persaingan ekonomi global tersebut semakin ketat dengan munculnya kekuatan-kekuatan global baru seperti Cina, India, Rusia dan Brazil. Dalam kaitannya dengan negara-negara atau wilayah yang sedang berkembang pada umumnya negara-industri maju menggunakan secara terpadu instrumen kebijakan ekonomi luar negeri yang dimilikinya yang terdiri dari tiga unsur yaitu perdagangan internasional, investasi dan pemberian pinjaman luar negeri. Sejak tahun 1970an Jepang sudah menggunakan ketiga instrumen itu untuk memantapkan posisi dominasi ekonomi di wilayah Asia Tenggara. AS, Uni Eropa dan Jepang juga menggunakan instrumen-instrumen yang sama di Afrika sebagai respons terhadap masuknya Cina dan India ke wilayah itu.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, AS tidak memberikan prioritas yang tinggi kepada Afrika. Selain karena di benua itu tidak ada sekutu strategis AS seperti NATO di Eropa Barat atau Jepang dan Korea Selatan di Asia Timur, dari segi ekonomipun Afrika bukan mitra dagang utama AS. Tragedi yang dialami pasukan AS di Mogadishu (Somalia) pada tahun 1993 membuat pemerintah AS semakin enggan untuk terlibat terlalu jauh di Afrika. Para pembuat kebijakan di Gedung Putih dan Kongres AS beranggapan bahwa Afrika lebih membutuhkan AS daripada sebaliknya. Karena itu sampai pertengahan tahun 1990an perhatian AS terhadap Afrika sangat minim. Salah satu akibat dari ketidakpedulian AS adalah tragedi genosida yang terjadi di Rwanda sekitar pertengahan tahun 1990an. Sebagai satu-satunya kekuatan global setelah usainya Perang Dingin, AS telah gagal memainkan peranan kepemimpinannya sehingga tidak mampu mencegah tragedi kemanusiaan tersebut. Serangan teroris yang menewaskan ratusan orang di Kedutaan Besar AS di Kenya dan Tanzania membuka mata AS bahwa kepentingannya di Afrika telah menjadi target ancaman oleh kelompok teroris Al Qaeda. Di tengah persaingan global mencari energi minyak dan munculnya Cina sebagai pemain global baru di Afrika membuka mata AS untuk mulai melakukan konsolidasi hubungan ekonomi dan politik dengan negara-negara Afrika. Dominasi Cina yang secara politik dan ideologi berseberangan dengan AS akan dilihat oleh Washington sebagai kendala untuk mengamankan kepentingannya di benua Afrika. Apalagi membaiknya situasi ekonomi dan keamanan di berbagai negara Afrika telah menciptakan iklim yang kondusif bagi perluasan bisnis pengusaha dari negara-negara maju.

Hubungan dagang antara AS dengan Afrika menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Jumlah perdagangan antara keduanya meningkat dari 29 milyar USD pada tahun 2000 menjadi 71 milyar USD pada tahun 2007. Dari tahun 2005 - 2006 ekspor AS ke Afrika Sub-Sahara tumbuh sebesar 17 persen atau 12 milyar USD. Peningkatan perdagangan hanya dalam waktu setahun ini menunjukkan tingkat penyerapan impor dari AS dari negara-negara di Afrika semakin meningkat sejalan dengan

...sebagai pemasok energi dunia Afrika relatif lebih aman dan bebas dari goncangan politik yang dapat menghentikan pemasokan minyak ke negara-negara industri.

peningkatan pembangunan ekonomi di wilayah itu. Tonggak sejarah hubungan perdagangan dan investasi AS dengan Afrika diawali dengan inisiatif dari pemerintahan Presiden Bill Clinton yang diteruskan pada masa pemerintahan George W. Bush yaitu *The African Growth and Opportunity Act* (AGOA). Di dalam kerangka AGOA, 38 negara Afrika dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitas perdagangan dari AS. Syarat yang ditentukan oleh AS meliputi komitmen terhadap keterbukaan ekonomi, pemerintahan yang demokratis dan transparan, penghormatan terhadap HAM dan pengurangan kemiskinan. Di bawah kerangka AGOA, pemerintah AS juga meluncurkan program *The Africa Global Competitiveness Initiative* (AGCI) di mana untuk tahun 2006-2010 dana sejumlah 200 juta USD disediakan untuk meningkatkan daya saing dan memperluas akses pasar bagi negara-negara Afrika di AS. Pemerintah AS juga menyediakan program *The Millenium Challenge Corporation* (MCC) untuk memberikan rewards bagi negara-negara Afrika yang dianggap telah menjalankan agenda yang sesuai dengan strategi global AS. Program bantuan luar negeri ini telah dinikmati oleh Ghana, Cape Verde, Benin, Lesotho, Mali, Madagascar dan Mozambique. Untuk mendorong investasi oleh sektor swasta AS menjalankan program *The African Financial Sector Initiative* (AFSI) berupa penyertaan modal swasta (*private equity funds*) dalam program-program yang membawa dampak signifikan bagi pembangunan seperti air bersih, kesehatan, usaha kecil dan menengah dan pendidikan. Di dalam program ini juga ada pelatihan untuk sektor perbankan dan perkreditan rakyat. AS juga melibatkan diri secara luas dalam bantuan luar negeri yang menyangkut pemberantasan penyakit menular di Afrika. Dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya peranan pemerintah dan sektor non-pemerintah AS (individu seperti pemilik Microsoft Bill Gates, misalnya) jauh lebih aktif dalam memberikan bantuan khusus untuk pemberantasan penyakit menular seperti AIDS, TB dan Malaria. Dalam kaitan ini pada tahun 2003, AS melancarkan program *The President's Emegency Plan for Aids Relief* (PEPFAR) untuk periode 5 tahun dengan jumlah dana sebesar 15 milyar USD untuk penanggulangan AIDS di 15 negara dimana 12 diantaranya bagian dari Afrika Sub-Sahara. Pada tahun 2005 Presiden George W. Bush melancarkan program *The President's Malaria Initiative* (PMI) untuk pemberantasan penyakit yang menjadi pembunuh nomor satu di Afrika dengan dana sebesar 1.2 milyar USD selama 5 tahun.³

³ Gregory L. Garland (Chief, Press and Public Affairs Office, Bureau of African Affairs), "African Trade and Economic Prospects", <http://www.state.gov> diakses tanggal 6 Juni 2008.

Pemerintah AS melalui perwakilannya yang tersebar di seluruh daratan Afrika terus mendorong sektor swastanya untuk melakukan investasi guna mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi di Afrika. Untuk mendukung kiprah sektor swastanya di Afrika pemerintah AS mengandalkan peranan *The Overseas Private Investment Corporation* (OPIC) yang tugas utamanya adalah menyediakan jasa asuransi bagi perusahaan swasta AS yang melakukan investasi di negara-negara berkembang termasuk kawasan Afrika. Pada tahun 2007 OPIC berhasil memobilisasi dana sejumlah 750 juta USD sebagai penyertaan modal pihak swasta untuk investasi di sektor infrastruktur dan perumahan. Pada bulan Februari 2008, OPIC berhasil memfasilitasi penyaluran investasi oleh pihak swasta dengan target kapitalisasi sebesar 875 juta USD di sektor kesehatan, *property*, teknologi, pasar obligasi serta Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Secara khusus OPIC menetapkan *The Liberia Enterprise Fund* dengan dana sebesar 30 juta USD untuk pembiayaan pengembangan UKM di Liberia.⁴

Meskipun ada persaingan yang ketat dalam mengambil manfaat dari pertumbuhan ekonomi dan sumberdaya alam Afrika antara AS dengan kekuatan global lainnya khususnya Cina, interaksi kepentingan mereka tidak selalu bersifat *zero-sum game*. Selain itu keunikan masing-masing kekuatan ekonomi global menciptakan semacam pembagian kerja (*division of labour*) di antara mereka yang pada gilirannya akan mempersulit negara lain termasuk Indonesia untuk memasuki sektor bisnis yang sudah didominasi oleh pemain-pemain besar. Presiden George W. Bush sendiri melihat bahwa kehadiran kepentingan strategis Cina di Afrika tidak mesti dilihat dengan kacamata kecurigaan meskipun pada saat yang sama pemerintah AS berusaha melakukan strategi *engagement* agar Cina juga terdorong untuk memperhatikan masalah *good governance*, pemberdayaan kelembagaan dan transparansi dalam menyalurkan bantuan luar negerinya.⁵ Ketika diwawancarai oleh *News Editor* dari *Council on Foreign Relations*, Yang Guang, Direktur *The Institute for West Asian and African Studies of the Chinese Academy of Social Sciences* menegaskan bahwa pada prinsipnya antara Cina dan AS tidak ada konflik strategis di Afrika. Sebagai sesama pengimpor sumberdaya alam Afrika, kedua negara berkepentingan untuk mengamankan pasokan dari benua tersebut. Selain itu, menurut Yang Guang,

⁴ Todd Moss (Deputy Assistant Secretary of State for African Affairs), "Africa: An Emerging Strategic Partner", <http://www.state.gov> diakses tanggal 6 Juni 2008.

⁵ James Swan (Deputy Assistant Secretary for African Affairs), "China - Africa Relations and the Global Village: Diplomatic Perspective", <http://www.state.gov> diakses tanggal 6 Juni 2008.

Cina dan AS tidak selalu fokus pada sektor yang sama. Selain melakukan investasi di sektor energi minyak dan gas, Cina juga meningkatkan investasinya di sektor-sektor yang padat modal seperti tekstil dan barang elektronik. Di sektor-sektor ini hampir tidak ada persaingan dengan perusahaan AS.⁶

Bagi AS kepentingan ekonomi dan bisnis di Afrika perlu ditunjang oleh aspek-aspek lainnya sebagai perwujudan dari statusnya sebagai negara adidaya. Di samping memaksimalkan keuntungan ekonomi dan bisnis dari pertumbuhan Afrika, AS juga memberikan prioritas bagi penyebaran gagasan demokrasi dan kebebasan politik, penyelesaian konflik secara damai dan penanggulangan ancaman terorisme serta pemberantasan penyakit AIDS, TB dan Malaria. Strategi pemerintah AS dalam mencapai tujuan-tujuan kebijakan luar negerinya ini selalu berangkat dari asumsi bahwa kepentingan ekonomi dan politik-ideologis tidak dapat dipisahkan dan merupakan paket kebijakan yang terpadu. Dengan demikian kemajuan yang dicapai dalam pengembangan demokrasi dan promosi HAM dijadikan syarat untuk mendapatkan bantuan ekonomi dari AS. Penetapan syarat-syarat yang bermuatan politik dan ideologis liberal inilah yang membedakan strategi AS dari strategi pemerintah Cina yang tidak begitu peduli dengan kondisionalitas seperti itu. Perbedaan yang memberikan keuntungan bagi Cina ini sangat nyata dari perbedaan sikap AS dan Cina menyangkut pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pemerintah Sudan di Darfur.

Terlepas dari adanya penafsiran yang berbeda tentang dampak peningkatan kepentingan strategis Cina di Afrika, yang pasti akhir-akhir ini AS mulai memberikan perhatian yang lebih besar kepada Afrika dan bahkan menjadikannya sebagai target strategis baru dari perluasan strategi global AS dalam bidang militer atau pertahanan. Hal itu terlihat dari munculnya gagasan pembentukan *Africa Command* (AFRICOM) sebagai struktur yang berdiri sendiri untuk menangani kepentingan keamanan AS di Afrika. AS telah melakukan pendekatan dengan negara-negara di Teluk Guinea (Kamerun, Equatorial Guinea, Gabon, Ghana, Liberia, Sao Tome and Principe dan Senegal) untuk menerima kehadiran AFRICOM dan sampai saat ini kebanyakan pemerintah di kawasan itu masih curiga dengan rencana pemerintah AS dan belum menyatakan kesediaan mereka untuk menerima kehadiran pangkalan militer AS. Tidak diragukan lagi tujuan utama AFRICOM adalah mengantisipasi

⁶ Wawancara yang dilakukan oleh News Editor dari Council on Foreign Relations dapat dilihat di <http://www.cfr.org/publication/14870/guang.html>. Diakses tanggal 6 Juni 2008.

serangan terorisme di perairan Teluk Guinea sebagai jalur perdagangan minyak yang vital bagi AS dan antisipasi jangka panjang persaingan strategis dengan Cina.⁷ Pada saat yang sama AS juga mendorong partisipasi negara-negara Afrika dalam program *Proliferation Security Initiative* (PSI) untuk mencegah kapal-kapal yang membawa bahan-bahan senjata pemusnah massal. Pada akhir Mei 2008 pemerintah AS menyambut baik keputusan Maroko untuk menjadi peserta dalam PSI.⁸

Hubungan historis Uni Eropa dengan Afrika telah berlangsung sejak zaman kolonial. Negara-negara besar maupun kecil yang tergabung dalam Uni Eropa seperti Perancis, Inggris, Portugal, Italia, Belgia, Belanda masing-masing memiliki bekas jajahan di Afrika. Ada semacam kedekatan emosional antara Uni Eropa dengan Afrika. Karena itu Uni Eropa tidak mau ketinggalan untuk berkiprah dalam pembangunan Afrika dan sumberdaya kolektif yang dimobilisasi merupakan modal utama bagi Uni Eropa untuk mempertahankan kepentingannya di Afrika. Bagi Afrika, Uni Eropa merupakan mitra dagang yang sangat penting apalagi secara geografis Eropa Barat lebih dekat dari Afrika jika dibandingkan dengan AS dan Jepang. Uni Eropa adalah pasar terbesar bagi komoditas ekspor dari Afrika, dimana sekitar 85 persen ekspor benang, buah-buahan dan sayuran ditujukan ke pasar Uni Eropa. Selain itu, Uni Eropa merupakan donor terbesar bagi negara-negara Afrika. Sebagai ilustrasi, dari tahun 1985 sampai tahun 2003 bantuan pembangunan yang diberikan oleh Uni Eropa kepada Afrika meningkat dari 5 milyar euro menjadi 15 milyar euro.⁹ Melihat agresivitas pemerintah dan sektor swasta AS, Cina,

Pelajaran lain yang bisa kita petik dari strategi AS, Uni Eropa dan Jepang adalah kepiawaian diplomasi ekonomi yang mereka lakukan di mana mereka selalu membahasakan strategi dan kebijakannya dari sudut pandang kepentingan jangka panjang negara-negara Afrika.

⁷ *The Economist*, June 6th 2008.

⁸ <http://www.state.gov> diakses tanggal 6 Juni 2008.

⁹ Commission of the European Communities, "Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee: EU Strategy for Africa: Towards a Euro-African Pact to Accelerate Africa's Development", Brussels, 12.10.2005.

Jepang dan India yang bermaksud mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi dan kekayaan alam Afrika, Uni Eropa mulai menyadari bahwa selama ini pendekatan yang dilakukannya terhadap Afrika masih bersifat fragmentaris dan belum terkoordinasi dengan baik. Dalam *Lisbon Declaration* yang merupakan hasil dari *EU - Africa Summit* tanggal 8-9 Desember 2007 yang merupakan pertemuan rutin kedua setelah yang pertama di Kairo pada tahun 2000 ditegaskan bahwa hubungan antara Uni Eropa dengan Afrika tidak lagi diwarnai oleh karakteristik *donor-recipient relationship* tetapi kemitraan yang sejajar. Tampak di sini para pemimpin Uni Eropa ingin menarik simpati dari negara-negara Afrika agar mereka tidak mengorbankan hubungan tradisionalnya dengan Eropa di tengah pertarungan kekuatan-kekuatan besar lainnya di benua Afrika. Untuk itu Uni Eropa telah mengambil inisiatif membentuk kemitraan dalam berbagai bidang dengan Afrika seperti perdamaian dan keamanan, pemerintahan yang demokratis dan HAM, perdagangan dan integrasi regional, pencapaian *Millenium Development Goals* (MDGs), energi, perubahan iklim, migrasi, mobilitas penduduk dan lapangan kerja serta ilmu pengetahuan, teknologi dan ruang angkasa. Untuk memfasilitasi peningkatan investasi oleh sektor swasta dari Uni Eropa di Afrika telah dibentuk *The EU-Africa Business Forum* yang merupakan wadah bagi para pengusaha kedua pihak untuk membahas cara-cara terbaik untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif agar menguntungkan kedua pihak. Pengusaha swasta dari Eropa tidak menyalakan kesempatan pertumbuhan sektor telekomunikasi di Afrika yang mengalami *booming*. Sebagai contoh, perusahaan raksasa dalam bidang telekomunikasi *Vodafone* dari Inggris melalui perusahaan lokal *Safaricom* telah menguasai pasar di Kenya sebagai operator terbesar di Afrika Tengah dan Timur.¹⁰

Sebagai kekuatan ekonomi kedua terbesar di dunia setelah AS, Jepang tidak ingin ketinggalan dari pesaing-pesaing utamanya di Asia yaitu Cina dan India untuk memperluas dan memperdalam hubungan ekonominya dengan Afrika. Jepang termasuk negara yang sangat optimis dengan prospek Afrika sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dunia pada abad 21. Dalam pidatonya di depan 40 kepala negara dan pemerintah Afrika yang sedang menghadiri *The Tokyo Conference on African Development* (TICAD) yang keempat di Yokohama tanggal 28-30 Mei 2008 Perdana Menteri Jepang Yasuo Fukuda menyatakan: "*Now together with the countries of Africa, Japan is*

¹⁰ *The Economist*, June 6th 2008.

determined to make the 21st century the century of African growth".¹¹ Jepang yang mengimpor hampir seluruh kebutuhan akan bahan mentah dan energi minyak dari negara-negara lain melihat peningkatan hubungan perdagangan dan investasi dengan Afrika sebagai suatu keniscayaan karena Jepang tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan mentah untuk industrinya hanya dari Asia Tenggara. Apalagi dalam hal ini Jepang harus bersaing dengan Cina, India dan negara-negara industri baru (NICs) seperti Korea Selatan dan Taiwan.

Sebagaimana strategi yang dikembangkan oleh Jepang terhadap negara-negara berkembang di Asia, Jepang mengintegrasikan tiga instrumen utama kebijakan ekonomi luar negerinya yaitu peningkatan perdagangan, bantuan luar negeri (ODA) dan *Foreign Direct Investment* (FDI). Perdana Menteri Yasuo Fukuda secara khusus menekankan keinginan Jepang untuk melibatkan diri secara ekstensif dalam pembangunan jaringan jalan dan pelabuhan di Afrika. Dukungan Jepang terhadap pembangunan infrastruktur ini tidak lain dimaksudkan untuk memudahkan FDI Jepang di Afrika serta meningkatkan aktivitas perdagangan dari dan ke Afrika. Keunggulan teknologi Jepang serta pengalamannya yang luas di Asia diperkirakan akan bermanfaat untuk menghasilkan pertumbuhan ekonomi di Afrika. Mengutip pernyataan yang dibuat oleh Fukuda: *If we are able to utilize Africa's plentiful resources more fully by harnessing Japan's technologies, this will surely be a major trigger for growth and benefit for Africa*".¹²

Pelajaran untuk Indonesia

Tanpa bermaksud untuk membuat perbandingan yang tidak seimbang antara pendekatan yang digunakan oleh AS, Uni Eropa dan Jepang dengan pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, ada sejumlah pelajaran dan *insights* penting yang bisa kita peroleh dari pengalaman mereka. Tidak diragukan lagi ketiga kekuatan ekonomi global yang diuraikan di atas memiliki visi dan optimisme yang sama tentang potensi pertumbuhan ekonomi Afrika yang telah menciptakan *demand* yang tinggi pula akan barang-barang impor dari luar. Afrika memiliki potensi yang sangat besar dan bahkan akan turut menentukan pertumbuhan ekonomi dunia pada masa yang akan datang. Karena itu mereka berlomba-lomba memobilisasi sumberdaya

¹¹ <http://www.ticad.net/about.shtml> diakses 6 Juni 2008.

¹² *Ibid.*

finansial yang dimilikinya untuk mengambil keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Afrika. AS, Uni Eropa dan Jepang tidak tanggung-tanggung dalam membangun hubungan ekonomi dengan Afrika di mana ketiga-tiganya memiliki komitmen kebijakan ekonomi luar negeri pada level yang paling tinggi sehingga memudahkan untuk membangun sinergi antara berbagai lembaga baik dalam pemerintahan maupun sektor swasta. Kebijakan ekonomi luar negeri AS, Uni Eropa dan Jepang bisa memiliki karakteristik multilevel dan multidimensional. Selain itu mereka melakukan kombinasi yang saling mendukung antara pendekatan berskala regional (mencakup Afrika secara keseluruhan melalui koordinasi dengan *African Union*) dengan pendekatan bilateral. Apa yang dilakukan oleh Cina dan India belakangan ini dengan menyelenggarakan *summit* dengan negara-negara Afrika sesungguhnya meniru apa yang sejak lama dipraktekkan Uni Eropa dan Jepang. Strategi menyelenggarakan *summit* yang mengundang semua kepala negara dan pemerintahan Afrika ini membawa efek yang kuat terhadap tindak lanjut peningkatan hubungan ekonomi selanjutnya dibandingkan dengan pendekatan hanya pada level menteri atau duta besar yang dilakukan secara sporadis tanpa agenda jangka pendek dan jangka panjang yang tersusun secara sistematis. Pelajaran lain yang bisa kita petik dari strategi AS, Uni Eropa dan Jepang adalah kepiawaiannya diplomasi ekonomi yang mereka lakukan di mana mereka selalu membahasakan strategi dan kebijakannya dari sudut pandang kepentingan jangka panjang negara-negara Afrika.

Tidaklah mengherankan kalau *summit* yang mereka adakan mendapatkan respons yang positif dari semua kepala negara dan pemerintahan Afrika. Di sini jelas berlaku prinsip bahwa tujuan yang besar hanya dapat dicapai dengan mobilisasi sumberdaya yang besar pula. Akhirnya, pelajaran yang berguna bagi Indonesia adalah sinkronisasi antara apa yang dilakukan oleh pemerintah AS, Uni Eropa dan Jepang dengan ekspansi bisnis yang dilakukan oleh sektor swasta. Sinergi antara kebijakan ekonomi luar negeri pemerintah dan agresivitas sektor swasta merupakan kunci untuk mengoptimalkan keuntungan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi Afrika. Semoga Indonesia dapat melakukan hal yang sama.